

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2016, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan berbagai permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Albert Ryan, 2011, *Buku Pegangan Pengadaan Barang dan Jasa*, Transmedia Pustaka
- Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Amirudin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta
- Anna Maria Tri Anggraini, *Sinergi BUMN Dalam Pengadaan Barang/Dan Atau Jasa Dalam Perspektif Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta
- Bambang Subroto, 2005, *Corporate Governance or Good Corruption Governance?*, Gramedia, Jakarta
- Bismar Nasution, 2003, *"Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate Governance"*, dalam Ridwan Khairandy dan Camelia Malik
- Denny Sanjaya, 2013, *Analisis Yuridis Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilakukan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.I Nomor 2, Jakarta
- Enggariyadi Noorsto *"Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Bank"*
- Hasnati, 2004, *Peranan Komite Audit dalam Organ Perseroan Terbatas dalam Kerangka Good Corporate Governance*, FH UII Press, Yogyakarta
- Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Predana Media Group, Jakarta
- H. Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, Jakarta, 2017
- Imam Suharto, 1995, *Manajemen Proyek, dari Konseptual Sampai Operasional*. Edisi Pertama Jilid I, Erlangga, Jakarta
- Mas Achmad Daniri, *"Reformasi Corporate governance di Indonesia"*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24, No 3, Tahun 2005

- Maria SW. Sumardjono, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta
- Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV Utomo, Bandung, 2005
- Nugroho Prabowo, Vania Utami dan Wahyu Aji P., *Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Menangani Perkara Persekongkolan Tender di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Privat Law Edisi 03 Nov. 2013, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam terbitan, 2005, *Undang-undang No. 5/1999 dan KPPU: prosiding rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta
- Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2016, *Paduan Lengkap UU Pengadaan Barang & Jasa, Cet. 1*, Laksana, Yogyakarta
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011
- Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta
- PT. Utama Karya (persero), *Pedoman tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance code/GCG code)*, edisi 2016
- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta
- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik
- Russel butarbutar, 2015, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi*, Gramata Publishing – Anggota IKAPI, Bekasi
- Septian Dandi, “*Tinjauan Terhadap Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Antara Penyedia Barang/Jasa Dengan Pengguna Barang/Jasa (Studi Kasus pada Bank Indonesia Kantor Perwakilan Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2010 - 2015)*”
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- Tjahjo Purnomo, selaku GM SDM PT. Utama Karya (Persero) dalam Kuisisioner
- Wijayanti Mahera “*Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Metode Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN*”, studi kasus pada perusahaan BUMN PT. XYZ

Wiyahya Permada Ayub, *“Pengadaan Barang Dan Atau Jasa Melalui Penunjukan Langsung Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Penunjukan Langsung Oleh PT. Pertamina)”*

Yusmawari R. Ambar, *“Penerapan Prinsip Transparansi (Transparency) Sebagai Pelaksanaan Dari Good Corporate Governance (GCG) Di Dalam Kegiatan Pengadaan (Procurement) Pada Perusahaan Yang Berstatus Sebagai Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk)”*

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera

Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

C. Data PT. Hutama Karya (Persero)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Deputi Bidang Akuntan Negara, 2017, Laporan Hasil Assessment Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2016 Pada PT Hutam Karya (Persero) Nomor: LGCG-61/D401/3/2017

PT. Hutama Karya (Persero), 2015, Risalah Rapat Direksi PT. Hutama Karya (Persero) Nomor: SP/PHH.1319B/RIS-RPT/41B-2015.

Tjahjo Purnomo, *Kuisisioner Dan Penjelasan: Penerapan Prinsip Gcg (Good Corporate Governance) Dalam Penunjukan Kontraktor Pembangunan Jalan*

Tol Sumatera, pengisi kuisioner adalah General Manager (GM) Sumber Daya Manusia pada PT Hutama Karya Persero, diisi pada tanggal 2 Desember 2017

Tjahjo Purnomo, *Kuisioner Tambahan: Penerapan Prinsip GCG (Good Corporate Governance) dalam Penunjukan Kontraktor Pembangunan Jalan Tol*. diterima pada tanggal 16 Maret 2018.